

INDONESIA MEMBUTUHKAN
Orang Pinter-Berakhlak

REMBANG (KR) - Di tengah situasi dunia yang tidak menentu setelah pandemi Covid-19, Indonesia sangat butuh orang yang pinter tetapi dan akhlak yang mulia. Kuncinya ada di pendidikan pondok pesantren (Ponpes), sehingga keberadaan pondok pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata dalam ikut menentukan nasib Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan KH Miftahul Akhyar, Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam pengajian akbar di halaman Ponpes Kauman Lasem Kabupaten Rembang, Rabu (16/2). Kehadiran sejumlah ulama di Lasem, terkait haul keluarga besar KH Mas' shoem yang juga salah satu pendiri NU bersama KH Hasyim Ashari.

"Karena faktor sejarah berdirinya NU di Ponpes Al Hidayah Lasem, maka khusus Kota Tua Lasem mendapat penghargaan sebagai PCNU tersendiri. Karena itu, kusus di Kabupaten Rembang ada Pengurus Cabang NU, yakni PCNU Rembang dan PCNU Lasem," jelas KH Miftahul Akhyar.

Menurutnya, Indonesia sangat butuh generasi muda yang bukan pinter dalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi yang lebih penting memiliki akhlak yang mulia. "Jika tidak memiliki akhlak yang baik, tunggu saja kehancurannya," tandas Kiai Akhyar di hadapan ratusan jamaah dan kiai dari berbagai daerah yang memadati kompleks Ponpes asuhan Gus Zaim itu.

Rois Aam yang baru saja terpilih dalam Muk-tamar PBNU di Lampung beberapa bulan lalu, dalam pengajian akbar juga mengambil contoh sejumlah profesor, baik dari Jepang, Eropa maupun Amerika yang mampu membuat robot menyerupai manusia, tetapi hanya untuk pemenuhan nafsu belaka.

Hal itu menunjukkan betapa penguasaan ilmu pengetahuan yang tanpa dibarengi dengan kekuatan spiritual atau akhlak yang baik, akan membawa peradaban yang tidak manusiawi.

Dalam konteks perdagangan bebas dunia, lanjut Rois Aam PBNU ini, betapa masing-masing pihak dengan sistem dan cara menghan-curkan lawan bisnis begitu kejam, bahkan nyaris tanpa kemanusiaan.

"Dunia bisnis memang kejam. Karena itu, Indonesia di era yang kejam seperti saat ini sangat membutuhkan generasi yang cerdas pinter dalam segala bidang, juga memiliki akhlakul khari-mah. Jawabannya hanya ada di pondok pe-santren yang sudah teruji mengawal berdirinya NKRI," tegas Kiai Akhyar. **(Ags)**



KR-Toto Rusmanto

Tiga bupati yang mengusulkan peningkatan jalan Baturraden-Serang-Belik.

PURBALINGGA (KR) - Tiga bupati minta Gubernur Jateng meningkatkan jalan dari Baturraden di wilayah Banyumas ke arah Desa Serang (Purbalingga) dan Kecamatan Belik (Pema-lang). Ketiga kepala daerah itu masing-masing Bupati Banyumas Achmad Husein,

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan Bu-pati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Kawasan wisata di Keca-matan Baturraden Banyu-mas dan Desa Wisata Se-rang Kecamatan Karangreja Purbalingga saling terhu-bung melalui ruas jalan se-

panjang 14,5 kilometer. Masing-masing 6,5 kilome-ter di wilayah Kabupaten Ba-nyumas dan 8 kilometer di Purbalingga. Ruas jalan ini juga menghubungkan ka-wasan wisata di wilayah Ka-bupaten Pemalang melalui ruas jalan sepanjang 15,5 kilometer, terdiri 3,5 kilome-ter di Purbalingga dan 12 kilometer di Pemalang.

"Ruas jalan tersebut me-lintasi kawasan hutan dalam pengelolaan Perhutani KPH Banyumas Timur dan saat ini sudah mengalami keru-sakan berat. Itu sebabnya saya bersama bupati Banyu-mas dan bupati Pemalang mengusulkan kepada Pem-prov Jateng agar meningkatkan jalan yang menghu-bungkan tiga tujuan wisata tersebut," kata Bupati Pur-

balingga, Rabu (16/2), usai Penandatanganan Bersama Usulan Peningkatan Jalan Baturraden-Serang-Belik di Pendapa Dipokusumo Pur-balingga.

Bupati Tiwi menambah-kan, sektor pariwisata meru-pakan sektor utama yang da-pat dengan cepat memu-lihkan ekonomi nasional se-telah pandemi Covid-19. "Untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah kabupaten Banyu-mas dan Purbalingga, serta akses jalan menuju Kabupa-ten Pemalang, diperlukan akses jalan yang memadai, terhubung dan lancar menu-ju potensi wisata di tiga kabu-paten tersebut," tandasnya.

Karena itu, lanjut Tiwi, di-perlukan perbaikan secepat-nya agar potensi wisata bisa

berkembang dan mening-kan ekonomi masyarakat sekitar. Selain untuk kepen-tingan pengembangan pari-wisata, wilayah lereng Gu-nung Slamet merupakan da-erah rawan bencana juga membutuhkan akses yang aman dan lancar.

Melihat potensi wilayah itu, sangat diperlukan duku-ngan bantuan dari Peme-rintah Provinsi Jawa Tengah. "Untuk meningkatkan jalan Baturraden, Serang dan Belik, diperlukan dana sekitar Rp 89,6 miliar. Sedikitnya ada 13 jembatan yang perlu dibangun lagi. Masing-masing 5 jembatan di wilayah Banyumas, 8 di wilayah Pur-balingga, dan 5 di wilayah Pemalang. Itu yang kami usulkan kepada Pemprpov Jateng," tandas Tiwi. **(Rus)**

JATAH PUPUK BERSUBSIDI BERKURANG
Karanganyar Dorong Pertanian Organik

KARANGANYAR (KR) - Alokasi pupuk subsidi tahun 2022 mengalami penurunan signifikan. Para petani disarankan beralih ke sistem organik dengan memakai pupuk kandang. Pada tahun lalu, jenis SP-36, ZA dan NPK hampir dua kali lipat lebih banyak, sedangkan urea mengalami kenaikan pada tahun ini.

"Kabupaten Karang-anyar pada tahun ini men-dapatkan urea 23.883.748 kilogram, SP-36 sebanyak 1.311.207 kilogram, ZA 1.184.074 kilogram, NPK 28.962.948 kilogram, POG 14.125.357 kilogram, dan POC 191.023 liter," kata Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dispertan PP Karanganyar, Nur Roh-mah Triastuti.

Menurut Nur Ruhman, pihaknya telah mendata 73.009 petani. Dari jumlah itu, 55.866 di antaranya memegang kartu tani. Alo-kasi pupuk subsidi tahun

ini disesuaikan keuangan pemerintah dan kebutuh-an bercocok tanam di 108.-773,78 hektare yang diren-canakan dalam tiga kali musim tanam. "Kami su-dah menghitung kebutuh-an pupuk untuk petani dan mendorong petani beralih ke pertanian organik," je-lasnya, Kamis (17/2).

Pengurangan jatah sub-sidi pupuk diharapkan tid-ak terlalu mempengaruhi petani organik di Karang-anyar. Sebab, selama ini para petani telah berhasil mensubstitusi kebutuhan unsur hara tanah dari se-

mula kimiawi ke pupuk kandang produksi mandiri.

Ketua Gabungan Kelom-pok Tani Desa Suruh-kalang Kecamatan Jaten, Sukino mengakui tidak la-gi mendapat jatah pupuk subsidi jenis ZA dan SP-36 pada tahun ini. Dalam Rencana Definitif Kebutu-han Kelompok (RDKK) hanya tertera 75 kilogram pupuk NPK sebanyak 82 kilogram urea serta pupuk organik cair (POC) untuk kebutuhan sekali musim tanam di lahan berukuran 0,9 hektare.

"RDKK pada tahun ini di

lahan sawah Desa Suruh-kalang berkurang. Pada umumnya petani yang mengandalkan subsidi pu-puk pabrikan, jatah segitu kurang. Mereka harus membeli kekurangannya di toko pertanian atau mene-bus dengan harga di atas

pasaran. Untuk petani yang sudah beralih ke sis-tem organik, itu tidak ber-pengaruh," kata Sukono. Diakui, sa,mpai saat ini me-mang belum banyak petani yang beralih ke pupuk mandiri, sehingga tetap bergantung urea. **(Lim)**



KR-Abdul Alim

Penyemprotan rumput padi dengan pestisida di Karanganyar.

Harus Sambungan hal 1

Sehingga, ketika harga bahan baku kedelai ini naik, maka akan sangat mempengaruhi kemampuan dan skala produksinya. Bahkan tidak jarang kenaikan bahan baku ini mem-buat banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, dia menekankan agar pemerintah tidak saja terpaku pada impor semata.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis un-tuk mengintervensi isu mahalnya harga dan kelangkaan kedelai yang setiap tahun terjadi di Indonesia.

"Isu mahal dan langkanya kedelai di pasaran membuat sejumlah peda-gang tahu dan tempe berencana menggelar aksi mogok produksi. Itu selalu terjadi setiap tahun. Jadi harus ada langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dari pemerintah," ka-ta Dedi.

Ia menyampaikan, hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini seba-gai langkah jangka panjang ialah mendorong agar jumlah produksi kedelai dalam negeri ditingkatkan. Sedangkan langkah jangka pendek yang bisa diambil ialah dengan menyiapkan ketersediaan kedelai, se-suai dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, intervensi di tengah isu mahal dan langkanya kedelai harus dilakukan, karena kedelai adalah sebuah kebutuhan mendasar dari pangan rakyat. Dedi meminta pe-merintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan segera melakukan langkah dalam mendorong keter-sediaan kedelai di pasaran, sekaligus menstabilkan harga. Sebab harga akan stabil saat kedelai ada dan mu-dah didapat.

"Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi sering kali untuk ke-pentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil di-banding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor," katanya.

Sedangkan terkait dengan minim-nya produksi dalam negeri, itu tak lepas dari kurangnya minat petani, karena secara ekonomis harga kedelai jauh di bawah padi dan jagung. Sehingga dalam hal ini juga perlu in-tervensi agar ada langkah strategis dalam mengatasinya.

Mengenai hal tersebut, Dedi me-nyampaikan agar pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pertanian harus segera membuat perencanaan,

mulai dari penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping hingga sejumlah alat produksi pascapanen.

"Karena pascapanen harus ada mesin pemanas, mesin pemilahnya, kalau perlu disediakan karung kedel-lai. Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam ke-adaan bersih karena bercampur de-ngan bahan lain. Sehingga pembeli ti-dak tertarik lagi," ucapnya.

Ia menilai kalau isu kedelai adalah isu klasik yang terus timbul setiap tahun dengan dibarengi ancaman mogok para pedagang. Sehingga hal ini harus segera ditangani, mulai dari mengetahui sejak dini dan menyiap-kan segala kebutuhan dasar produksi baik perencanaan impor atau tanam lokal.

"Itu diperlukan langkah efektif dan nyata dari Kemendag dan Kementan. Sehingga misal ada kesepakatan in-tervensi tanam tapi harus dijamin ada yang membeli itu kedelainya. Se-ring kali petani mengalami kerugian karena menanam kedelai tapi dijual harga yang murah," katanya. **(Ant)-f**

Pemerintah Sambungan hal 1

Terkait dengan itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menyeluruh dari hulu ke hilir untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.

"Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebi-jakan yang diambil dari hulu juga. Ada indikasi permainan harga oleh

pihak-pihak tertentu yang perlu se-gera diselesaikan," kata LaNyalla.

Senator dari Jawa Timur itu melan-jutkan, pemerintah harus memper-hatikan perjuangan rakyat untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedang-kan pengusaha besar mendapat keun-tungan dari tingginya harga CPO.

"Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak go-reng sudah empat bulan lamanya.

Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyara-kat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi," papar dia.

Ditambahkannya, konsumen ter-besar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. De-ngan harga minyak goreng yang masih tinggi dan belum stabil, maka mereka yang paling merasakan dampaknya. **(Ant)-f**

Kepatuhan Sambungan hal 1

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mela-porkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah signifikan sebanyak 1.964 kasus sehingga total 171.726 kasus pada Sabtu (19/2). Re-rata kasus positif harian mencapai 11,35 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 13.324 kasus.

"Kasus Covid-19 trennya mengalami kenaikan lagi di DIY. Riwayat semen-tara kasus terkonfirmasi Covid-19 yang baru tersebut sebanyak 1.479 kasus berasal dari tracing kontak kasus posi-tif dan 485 kasus periksa mandiri,"

ujarnya.

Ditya mengatakan angka kesembu-han pun bertambah sebanyak 163 kasus dengan demikian total kasus kesem-buhan di DIY mencapai 153.095 kasus. Sementara itu, kasus pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY juga dilaporkan terjadi penambahan 3 kasus se-hingga total kasus meninggal menjadi 5.307 kasus.

"Jumlah orang yang diperiksa sam-pelnya di DIY sebanyak 13.691 orang. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 89,15 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkon-

firmasi positif Covid-19 sebanyak 3,09 persen di DIY," paparnya.

Selanjutnya, Ditya menyampaikan jumlah ketersediaan Tempat Tidur (TT) di 27 RS Rujukan Covid-19 mencapai 1.477 bed. Jumlah ketersediaan tempat tidur critical mencapai 195 bed dan ter-pakai 46 bed, sedangkan jumlah keter-sediaan tempat tidur non critical menca-pai 1.282 bed dan terpakai 436 bed.

"Keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) RS Rujukan di DIY total di kisaran 32,63 persen de-ngan rincian BOR Isolasi mencapai 34,01 persen dan BOR ICU mencapai 23,59 persen," imbuhnya. **(Ria/Ira)-f**

Jepang Sambungan hal 1

"Padahal, dari semalam kita sudah kumpul dan bertanya ke pemain, mereka menjawab siap berjuang habis-habisan untuk menyumbang poin," imbuh Herli.

"Syuklur, alhamdulillah, hasil ini harus kita syukuri. Diberi kemudahan bisa lo-los ke final dengan tanpa tanding. Anak-anak sebenarnya sudah siap tempur dan kondisi pemain juga sehat dan siap se-cara mental dan fisik," papar pelatih gan-da putri pelatnas bulutangkis Indonesia, Prasetyo Restu Basuki.

"Dalam babak final Minggu (20/2) hari ini, regu putri Indonesia bakal bertemu

putri Korsel yang dalam semifinal ke-marin menang 3-0 atas Malaysia. Kemana-ngan tanpa tanding ini membuat pe-main tambah semangat. Meski target ke final sudah dicapai, kita akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan di partai puncak nanti," ujar Prasetyo.

Menghadapi Korsel di final, meru-pakan pertemuan kedua di antara mereka. Pasalnya, pada babak penyisihan Grup A Kamis (17/2) lalu kedua tim ini sudah saling berjumpa, yang dime-nangkan putri Indonesia dengan skor ti-pis 3-2. **(Rar)-f**

Pertahankan Sambungan hal 1

adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945. "Apalagi dengan potensi ju-mlah penduduk No 4 di dunia, Indonesia bisa menjadi negara besar," tegas Idham.

Dijelaskan juga *founding father* Indone-sia, Soekarno yang pertama kali menjelas-kan Pancasila pada 1 Juni 1945 yang asli digali dari Indonesia menjadi Hari Lahir Pancasila. Dilanjutkan Piagam Jakarta

22 Juni 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 Pancasila mengakomodir perminta-an dari Indonesia Timur, Sila 1 berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. "Saat itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indone-sia, KH Wahid Hasyim dari NU dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah bisa menerima permintaan dari Indonesia Timur," ungkap Idham. **(Vin)-f**